JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 871-875
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2054

Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak di Kelurahan Rano Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Pramudia Agusni*, Fuad Muchlis, Marwoto, Rts. Suwairini
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi
JL. H.A. Manaf Telanaipura - Jambi - Indonesia
*Correspondence email: pramudia.agusni14@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi sumberdaya alam Hutan Kota Sabak, menganalisis manfaat pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak bagi masyarakat sekitar baik secara Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dan Budaya, dan Merumuskan Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis vegetasi menunjukkan potensi flora yang ada pada kawasan Hutan Kota Sabak memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi dengan jenis tanaman tingkat Pohon dan tingkat Tiang yang memiliki INP lebih dari 15% sedangkan untuk tingkat Pancang terdapat 7 jenis yang memilki INP lebih dari 10 % dan tingkat Semai memiliki 5 jenis yang memiliki INP lebih dari 10%, sementara itu jenis-jenis Fauna sebagai potensi untuk pengembangan objek daya tarik Edukasi dan Eduwisata. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa manfaat pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak dari aspek Ekologi untuk mengurangi degradasi lingkungan kota, dari aspek Ekonomi Hutan Kota Sabak dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian melalui kesempatan berusaha, peluang bekerja, meningkatkan kreatifitas kerajinan, dan memberikan manfaat dalam aspek sosial budaya sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai landmark kota yang berbudaya. Hasil analisis stakeholders menunjukkan bahwa Penggabungan Kuadran I (*subjek*) dengan kuadran III (*Context setters*) dalam pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak dapat menjadi kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak. Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak adalah dengan dukungan dari para pihak yang memiliki Pengaruh dan Kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak.

Kata Kunci: Hutan Kota Sabak; Strategi; Pembangunan dan Pengelolaan

Abstract. *This study aims to analyze the natural resources potential of the Sabak City Forest, analyze the benefits of development and management of the Sabak City Forest for the surrounding community both Ecologically, Economically, and Socially and Culturally, and Formulate the Development and Management Strategy of the Sabak City Forest. Based on the results of research using vegetation analysis, it shows that the potential flora in the Sabak City Forest area has a high diversity value with plant species at the Tree level and Pole level having an INP of more than 15% while for the Sapling level there are 7 species that have an INP of more than 10%. and the Semai level has 5 species that have an INP of more than 10%, meanwhile the types of Fauna are potential for the development of educational and educational attractions. This study also shows that the benefits of the development and management of the Sabak City Forest from the Ecological aspect to reduce urban environmental degradation, from the Economic aspect of the Sabak City Forest can be an opportunity to improve the economy through business opportunities, work opportunities, increase craft creativity, and provide benefits in social aspects. culture as a space for social interaction, recreational facilities, and as a cultural landmark of the city. The results of the stakeholder analysis show that the amalgamation of Quadrant I (subjects) with quadrant III (Context setters) in the development and management of the Sabak City Forest can be a major force that greatly influences the development and management of the Sabak City Forest. The strategy for the development and management of the Sabak City Forest is with the support of parties who have influence and interest in the development and management of the Sabak City Forest.*

Keywords: *Sabak City Forest; Strategy; Development and Management*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota menyatakan bahwa pembangunan Hutan Kota memiliki aspek kajian ekonomis, sehingga Hutan Kota selain dari fungsi lindung keanekaragaman hayati Hutan Kota juga merupakan sumber pemasukan bagi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa keberadaan objek wisata dapat meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara tidak langsung keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Lahan Pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan lahan terbesar digunakan untuk perkebunan dengan luas 46.04% Ha, Pemanfaatan Hutan 45,33% Ha, Pertanian 8,61% Ha, dan untuk Pertambangan 0,01%. (DIKPLHD DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2019).

Pembangunan Hutan Kota Sabak merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menciptakan Kabupaten paling Timur Provinsi Jambi sebagai daerah tujuan wisata out door yang multifungsi, yaitu sebagai Tempat Wisata Alam,

Olah Raga, Outbond, Pendidikan dan Penelitian (sekolah Alam), pelestarian Plasma Nutfah, Pusat Kuliner, pentas seni, gedung Pertemuan, Taman Bermain, Demplot Kopi Liberika, dan kegiatan even-even daerah dan nasional sebagai lokasi alternatif. Pembangunan Hutan Kota Sabak yang berlokasi di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat dengan titik koordinat Geografis 103º46'06" BT dan 01º12'01" LS. Lokasi Hutan Kota di Bangun diatas Tanah Hak Pakai dengan Nomor sertifikat 13 tertanggal 27 Juli 2012, dan ditegaskan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 310 tahun 2016 dengan luas 83 Ha. Hutan Kota Sabak dapat menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai Icon Baru daya tarik wisata. Selain menjadi paru-paru perkotaan hutan kota dapat dimanfaatkan menjadi RTH bagi masyarakat sekitar, juga sebagai pusat kuliner, pusat pendidikan, pusat penelitian dan hal-hal lain yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat atau bahkan wisatawan yang melintas sebagai tempat berekreasi yang perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas penunjang wisata lainnya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan efek manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dan Budaya bagi kebanyakan orang.

Keberagaman dan kekhasan jenis Flora dan Fauna yang terdapat di Hutan Kota Sabak merupakan salah satu Potensi yang menjadi objek dan daya tarik wisata alam baik untuk penelitian maupun edukasi. Tingginya tingkat keragaman dan kekhasan inilah yang menjadi salah satu tujuan dari Pembangunan yang akan dilakukan, hal ini dikarenakan Flora dan Fauna tersebut merupakan Endemik Rawa Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan salah satu asset berharga yang harus menjadi perhatian, perlindungan dan pengelolaan agar dapat menjadi icon Hutan Kota Sabak demi menjaga keberlangsungan Ekosistem. Salah satu Fauna Endemik Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdapat di Hutan Kota adalah Tapir (*Tapirus indicus*) dan Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*) yang di lindungi berdasarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang di Lindungi. Sedangkan Flora Endemik Tanjung Jabung Timur adalah Jelutung (*Dyera lowii*), Meranti Rawa (*Shorea sp*), Tembesu Rawa (*Fragraea fragrans Roxb*), Nibung Putih (*Oncosperma tigillarium*), Mersawa (*Anisoptera marginata*), Punak (*Tetrameristra glabra*), Simpur *(Dillenia*), dan Merbau *(Intsia sp*). Tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang terdapat dalam Hutan Kota Sabak. Oleh karena itu salah satu alasan pemilihan Lokasi Hutan Kota Sabak sebagai objek penelitian adalah untuk mengetahui Potensi yang terdapat di Hutan Kota Sabak sehingga dapat memberikan masukan arah dan strategi pembangunan Hutan Kota yang dapat bermanfaat dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang di tinjau dari aspek Ekologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta pendidikan.

METODE

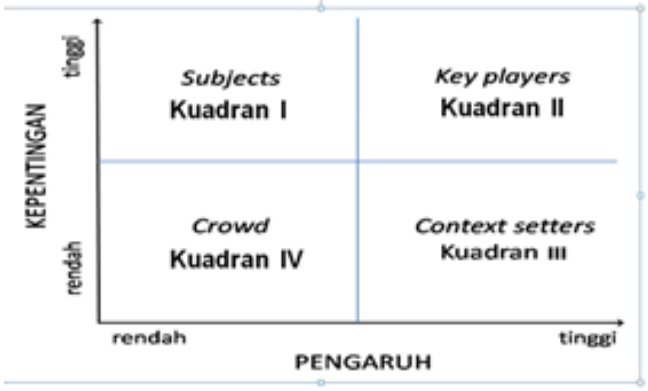
Penelitian ini dilakukan di Hutan Kota Sabak, yang berlokasi di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Timur yang berjarak 500 m dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung. Dengan melakukan Observasi lapangan dan pembagian kuisioner pada beberapa responden yang ditentukan berdasarkan kualifikasinya dan pengaruhnya terhadap kebijakan, dengan waktu penelitian ± 2 bulan. Untuk mengetahui potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berada dalam Kawasan Hutan Kota Sabak, maka inventarisasi lapangan dan rekapitulasi jenis, jumlah pohon/rumpun HHBK yang menempati jalur inventarisasi akan menggambarkan seberapa besar Potensi yang terdapat dalam dalam kawasan Hutan Kota Sabak dan selanjutnya pola penyebaran jenis HHBK dalam satu kawasan dapat diperjelas dalam data hasil rekapitulasi yang dibuat berdasarkan data inventarisasi lapangan pada metode petak contoh, dengan cara penaksiran berdasarkan petak contoh. Bila Lokasinya berupa suatu daerah yang luas maka diambilah seluas tertentu saja dari daerah itu yang disebut sebagai area minimal, dan dari daerah contoh tersebut dihitung semua tumbuhan yang diamati. Pengukuran yang dilakukan pada petak contoh tersebut digunakan sebagai penaksir dari keadaan semua lokasi penelitian yang dilakukan. Ketepatan analisis berdasarkan petak contoh ini adalah didasarkan atas 3 hal pokok yaitu: a) Populasi dalam tiap petak contoh yang diambil harus dapat dihitung dengan tepat; b) Luas atau satuan tiap petak contoh harus jelas dan pasti; dan c) Petak contoh yang diambil harus dapat mewakili seluruh area atau daerah penelitian.

Untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini yaitu mengenai potensi sumberdaya alam yang terdapat dalama kawasan hutan kota Sabak akan dilakukan pengamatan dan observasi langsung dilapangan serta mewawancarai beberapa masyarakat setempat yang mengetahui tentang Kawasan Hutan Kota Sabak. Analisis yang akan di gunakan dalam observasi dilapangan adalah dengan menggunakan Analisis Vegetasi. Untuk menjawab tujuan yang kedua yaitu mengenai Manfaat Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak bagi masyarakat baik secara Ekologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, akan dilakukan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat Yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Kota Sabak dan *stakeholder*. Untuk menjawab tujuan yang ketiga yaitu Penggunaan Analisis *Stakeholders*. Untuk dapat membuat rumusan strategi pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak dari aspek pengaruh dan kepentingannya, dilakukan dengan analisis *stakeholders*. Menurut Reed *et al.* (2009), analisis *stakeholders* dilaksanakan dengan cara: 1) melakukan identifikasi *stakeholders*, 2) mengelompokkan dan membedakan

antar stakeholders, dan 3) menyelidiki hubungan antar *stakeholders*.

Analisis *stakeholder* ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program/proyek. Hal-hal yang diungkap dari *tools* ini bisa memberikan informasi sangat penting seawal mungkin tentang : a) siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program / proyek baik positif ataupun negatif; b) siapa saja yang mungkin memberikan pengaruh terhadap program / proyek baik positif ataupun negatif; dan c) individu, kelompok, dan lembaga apa saja yang perlu dilibatkan dalam program/proyek serta bagaimana caranya; dan siapa saja yang perlu dibangun kapasitasnya agar turut berpartisipasi aktif di dalamnya.

Identifikasi *stakeholders* merupakan proses yang dilakukan secara berulang, hingga ditetapkan *stakeholders* yang benar-benar mengetahui konsep pembangunan dan pengelolaan hutan kota Sabak. Jika pembatasan *stakeholders* telah ditetapkan sejak awal, maka *stakeholder* memang dapat lebih mudah teridentifikasi, tetapi hal ini mengandung resiko bahwa beberapa *stakeholders* akan terabaikan, dan tentu saja identifikasi ini menjadi tidak relevan lagi. Berdasarkan data jawaban *stakeholders* yang teridentifikasi terhadap tingkat kepentingan dan pengaruhnya, dilakukan skoring menggunakan *Microsoft Excel* untuk menentukan angka pada setiap indikatornya yang kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat.



Sumber: Bryson 2004 dan Reed *et al* 2009

Gambar 1. Matriks pengaruh dan pemangku kepentingan

Keterangan : Kuadran II → Kepentingan Tinggi, Pengaruh Tinggi orang-orang yang benar-benar harus dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi strategi; Kuadran I → Kepentingan Tinggi, Pengaruh Rendah orang-orang yang dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi strategi namun dalam porsi yang tidak terlalu banyak; Kuadran III → Kepentingan Rendah, Pengaruh Tinggi orang-orang yang perlu dipertahankan dengan memberikan cukup banyak informasi karena akan sangat banyak membantu dalam proses implementasi strategi; dan Kuadrab IV → Kepentingan rendah, pengaruh rendah orang-orang yang cukup dipantau dengan komunikasi secara wajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan (Interest) Stakeholders

Terkait dengan hasil dari analisis kepentingan *(interest*) dan aspirasi *stakeholders* tersebut, pada prinsipnya masing-masing *stakeholders* memiliki kepentingan yang bersifat spesifik. Hal ini berhubungan dengan kewenangan, otoritas, peran, dan tanggung jawab yang terdapat pada masing-masing *stakeholders* terkait Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Kota Sabak.

Tabel 1. Tingkat Kepentingan *Stakeholders* Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak

No	Stakeholders	Aspek Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak					Jumlah
		Kebijakan	Ekonomi	Ekologi	Sosial	Budaya	
1	DPRD Kab. Tanjab Timur	5	4	2	3	3	17
2	BAPPEDA	5	4	3	3	3	18
3	DLH	4	3	5	3	4	19
4	DPUPR	4	3	2	2	1	12
5	DISPERKIM	5	3	4	3	3	18
6	DISPARBUDPORA	4	4	2	4	5	19
7	DISPERINDAG	4	5	3	4	3	19
8	DISPERBUNAK	3	5	4	3	3	18
9	DISDIK	4	3	4	3	4	18
10	DISHUB	3	3	1	1	1	9
11	TNBS	2	1	4	1	1	9
12	BKSDA Jambi	2	1	5	2	2	12
13	KPH Unit XIV TanjabTim	1	1	3	1	2	8
14	Camat Ma. Sabak Barat	4	4	3	4	4	19
15	Lurah Rano	4	4	3	4	4	19
16	Masyarakat Sekitar Hutan Kota	1	5	4	5	5	20

Sumber: data olahan

Tabel 1 untuk tingkat Kepentingan, dari 16 *Stakeholders* menunjukan bahwa Masyarakat Sekitar Hutan Kota Sabak memiliki Kepentingan yang sangat Tinggi dibandingkan dengan *Stakeholders* yang lain dengan nilai 20, kepentingan tertinggi dilihat dari aspek Ekonomi dengan nilai 5, disusul aspek aspek Sosial dan budaya bernilai 5, sedangkan kepentingan dari aspek Ekologi bernilai 4, yang paling rendah berada pada aspek Kebijakan bernilai 1. Sedangkan pada institusi pemerintah tingkat kepentingan yang tertinggi berada pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Parbudpora, Dinas Perindag, Camat Muara Sabak Barat dan Kelurahan Rano dengan Nilai 19. Tingkat Kepentingan institusi Dinas Lingkungan Hidup berada pada aspek Ekologi yang bernilai 5, Dinas Parbudpora lebih pada aspek Budaya dengan nilai 5, Dinas Perindag pada aspek Ekonomi yang bernilai 5, Camat Muara Sabak Barat dan Lurah dengan Nilai 19 berada pada semua Aspek Kebijakan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan nilai masing-masing 4. Dan untuk Institusi dengan tingkat kepentingan paling rendah berada pada Dinas Perhubungan dan Balai Taman Nasional Berbak Sembilan dengan masing-masing nilai 9.

Pengaruh Stakeholders

Menurut Reed et al (2009), untuk melihat besarnya tingkat pengaruh masing-masing stakeholders

terhadap Pembanguan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak, maka perlu diketahui informasi terhadap kekuatan stakeholders dalam mempengaruhi Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak. Tabel 2 pada tingkat pengaruh dari 16 Stakeholders didapat bahwa DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur memilki tingkat pengaruh yang sangat tinggi terhadap rencana pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak dengan nilai 23, BAPPEDA memiliki tingkat Pengaruh yang cukup tinggi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak dengan nilai 21 karena OPD ini memiliki kewenngan dalam penganggaran dan kebijakan sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Perindag memiliki tingkat pengaruh yang bernilai 20 hal ini dikarenakan pada institusi tersebut lebih berperan dalam kegiatan pembangunan Fisik dan bersifat teknis. Dan institusi Pemerintah yang memilki pengaruh yang rendah ada di KPH Unit XIV Tanjab Timur dengan nilai 5 dan Balai Taman Nasional Berbak Sembilan dengan nilai 7, hal ini dikarenakan pada kedua institusi ini tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak.

Tabel 2. Skoring Pengaruh Stakeholders dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak

No	Stakeholders	Instrumen Kekuasaan			Sumber Kekuatan		Jumlah
		Condign	Compensatory	Conditioning	Personality	Organitation	
1	DPRD Kab. Tanjab Timur	5	5	4	4	5	23
2	BAPPEDA	5	4	4	4	4	21
3	DLH	5	4	4	4	3	20
4	DPUPR	5	4	4	4	3	20
5	DISPERKIM	5	4	4	4	3	20
6	DISPARBUDPORA	4	4	3	4	4	19
7	DISPERINDAG	4	5	4	4	3	20
8	DISPERBUNAK	4	3	3	3	4	17
9	DISDIK	3	3	4	4	4	18
10	DISHUB	2	1	2	2	2	9
11	TNBS	1	1	1	2	2	7
12	BKSDA Jambi	4	3	4	3	5	19
13	KPH Unit XIV Tanjab Timur	1	1	1	1	1	5
14	Kec. Muara Sabak Barat	5	3	3	3	4	18
15	Kel. RANO	5	3	3	3	3	17
16	Masyarakat Sekitar Hutan Kota Sabak	1	3	1	2	3	10

Sumber: data olahan

Klasifikasi Stakeholders

Nilai penting (*importance*) Tabel 1 dan pengaruh stakeholders pada Tabel 2, yang dijumlahkan dalam Tabel 3, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk gambar dengan menempatkan posisi masing-masing stakeholders ke dalam empat kategori. Gambar 2 menunjukkan posisi masing-masing stakeholders tersebut dalam konteks keberhasilan Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak Tabel 3

Tabel 3. Jumlah Skoring Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders pada Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak

No	Stakeholders	Pengaruh	Kepentingan	Skor Prioritas
1	DPRD Kab. Tanjab Timur	23	17	391
2	BAPPEDA	21	18	378
3	DLH	20	19	380
4	DPUPR	20	12	240
5	DISPERKIM	20	18	360
6	DISPARBUDPORA	19	19	361
7	DISPERINDAG	20	19	380
8	DISPERBUNAK	17	18	306
9	DISDIK	18	17	306
10	DISHUB	9	9	81
11	TNBS	7	9	63
12	BKSDA Jambi	19	12	228
13	KPH Unit XIV TanjabTim	5	8	40
14	Kec. Ma. Sabak Barat	18	19	342
15	Kelurahan Rano	17	19	323
16	Masyarakat Sekitar Hutan Kota	10	20	200

Sumber: data olahan



Sumber: data olahan

Gambar 2. Klasifikasi Stakeholders berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak.

Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak langsung maupun tidak langsung Masyarakat Kabupaten Tanjab Timur akan merasakan dampak baik dari Aspek Ekologi, Aspek Ekonomi, dan Aspek Sosial dan Budaya karena Masyarakat itu sendiri merupakan salah satu stakeholders yang memiliki kepentingan yang tinggi tapi memiliki sedikit pengaruh terhadap suatu pembangunan dan pengelolaan, berbeda hal nya dengan beberapa institusi yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap kebijakan suatu pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota Sabak. Dan ada juga beberapa institusi yang hanya memiliki kepentingan tapi sangat minim terhadap pengaruh dalam pembangunan dan pengelolaaan Hutan Kota Sabak tersebut.

SIMPULAN

Potensi Keanekaragaman hayati flora dan Fauna yang terdapat di Hutan Kota Sabak masih cukup tinggi, dan hal ini merupakan salah satu asset yang sangat

bernilai bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik secara Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dan Budaya. Manfaat Hutan Kota Sabak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dapat dilihat dari 3 Aspek yaitu manfaat Ekologi yang terdiri dari memberikan manfaat mampu mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh ekses negatif pembangunan, memiliki Estetika, dan menjaga keseimbangan Ekosistem. Sedangkan Manfaat Ekonomi yaitu menciptakan peluang bekerja dan berusaha. Dan Aspek Sosial dan Budaya yaitu sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai landmark Kota yang berbudaya. Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Sabak adalah dengan dukungan dari para pihak yang memiliki Pengaruh dan Kepentingan dan membagi dalam tiga tahapan kegiatan yaitu Jangka Pendek, jangka Menengah dan jangka panjang. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan Ekologi untuk meningkatkan.

Daftar Pustaka

Bryson JM. 2004. What to Do when Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53.

Dinas Lingkungan Hidup. 2019. *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)*. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Muara Sabak.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Nomor P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017. Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp). Jakarta.

Reed MS et al. 2009. Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*. 30(4), 1-17.